

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DESA PALANGKA PASCA PEMILUKADA SINJAI

**Oleh:
Mursak
(Dosen STISIP Muhamadiyah Sinjai)**

Abstrak

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat, karena sejak dulu masyarakat telah dihadapkan pada suatu pemilihan yaitu pemilihan kepala desa. Seiring dengan perkembangan zaman akhirnya masyarakat dihadapkan pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Dengan hal terkadang terjadi suatu perubahan sosial dalam lingkungan masyarakat pasca pemilukada. Kondisi real yang terjadi pada saat sekarang ini dalam lingkungan masyarakat. Setiap pasca pemilukada sering terjadi suatu perubahan yaitu perubahan sosial, salah satunya adalah terjadinya suatu hubungan yang tidak harmonis antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. Hal itu terkadang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat sebagai pemilih untuk memilih calon pemimpin.

Dengan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait perubahan sosial masyarakat Desa Palangka pasca pemilukada Kabupaten Sinjai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis secara ilmiah perubahan sosial masyarakat Desa Palangka pasca pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data kemudian menyajikan data yang ada sehingga lebih mudah dipahami. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan sosial masyarakat Desa Palangka. Baik dari segi sistem politik dan kekuasaan, sistem kekeluargaan yang tidak harmonis maupun sistem status.

Kata Kunci: Perubahan Sosial, Pemilukada

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Selama ini, baik dimasa orde baru maupun di Era Reformasi, kedaulatan sepenuhnya berada ditangan lembaga-lembaga eksekutif, dan ditangan lembaga legislatif. Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilu berlangsung. Sesudah itu semua hak politik yang dimiliki rakyat beralih kepada partai politik sehingga rakyat tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan sudah dilupakan sama sekali.

Dengan hal tersebut, terkadang rakyat merasa tidak memiliki hak yang seutuhnya lagi untuk memilih seorang pemimpin, akhirnya akan

memicu timbulnya suatu konflik terhadap pemimpin yang terpilih dan bahkan konflik antar sesama anggota masyarakat selaku pemilih.

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung sebenarnya bukanlah hal yang asing bagi masyarakat. Sejak dulu masyarakat telah dihadapkan pada pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung. Desa merupakan perangkat pemerintahan terkecil dalam melaksanakan proses demokrasi. Dengan konteks yang sama dan lingkup yang berbeda, masyarakat kini dihadapkan pada pemilukada langsung yang tentunya dengan pelaksanaan yang lebih kompleks.

Format kepala daerah sebagai pemimpin eksekutif telah terlihat proporsional dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kedudukan gubernur dan bupati/walikota sebagai kepala ekse-

kutif. Sebagaimana kepala pemerintahan lain, kepala daerah sebagai kepala eksekutif (*chief executive*) daerah harus dapat melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah di antaranya, *protective, public service, dan development*. Bupati/Walikota dalam kerangka otonomi daerah menjadi penanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya penerapan otonomi daerah tentu akan sangat bergantung pada kepala daerahnya.

Tak dapat dipungkiri bahwa proses pemilukada langsung lahir dari alternatif solusi akumulasi kekecewaan terhadap kepemimpinan daerah dan kinerja aparatnya. Akan tetapi pemilukada langsung tidak dengan sendirinya menjamin bahwa akan lahir seorang pemimpin yang *kapabel, kredibel* dan juga *akuntabel*. Walaupun dengan pemilukada langsung setidaknya akan melahirkan legitimasi rakyat yang kuat, akan tetapi krisis kepemimpinan daerah terbukti belum sepenuhnya terselesaikan. Legitimasi langsung bukanlah satu-satunya faktor penentu berhasilnya penerapan sistem demokrasi untuk mencari seorang pemimpin yang ideal.

Kondisi real yang terjadi pada lingkungan masyarakat sekarang ini pasca pemilukada yaitu adanya suatu perubahan yakni perubahan sosial, salah satunya adalah hubungan yang tidak harmonis baik itu antar sesama keluarga, kerabat maupun pertemanan. Ini semua akan terjadi setiap melakukan suatu pemilihan kepala daerah, karena setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam menentukan seorang pemimpin sesuai dengan pilihan mereka yang layak untuk dijadikan seorang pemimpin.

Menurut Mujibur Rohman (2013), perubahan sosial dipengaruhi oleh lima hal, yaitu:

perubahan struktur pola hubungan sosial, persebaran penduduk, sistem politik dan kekuasaan, hubungan keluarga, dan sistem status. Dari kelima hal tersebut, itulah terkadang menimbulkan konflik yang tidak diharapkan dalam lingkungan masyarakat pasca pemilukada.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perubahan sosial masyarakat desa palangka pasca pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian digunakan adalah penelitian kualitatif. Salah satu alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti akan menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan. Lokasi Penelitian, yaitu di Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari hasil wawancara terhadap beberapa Informan dalam hal ini para tokoh masyarakat yang ada di Desa Palangka, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian, hasil pengamatan, serta berbagai opini atau pernyataan yang muncul di berbagai media cetak. Sumber data yang lainnya yakni dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian kualitatif ini adalah teknik analisis interaktif. Teknik analisis interaktif ini dijalankan dengan cara Reduksi data yang meliputi proses merangkum dan memilah data yang berkeai-

tan dengan hal-hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian data yang dapat diartikan sebagai pengorganisasian data yang telah direduksi. Dalam penyajian data ini peneliti melakukan upaya untuk menyusun pola hubungan dari seluruh data yang ada sehingga data lebih mudah dipahami. Berdasarkan pada data yang telah terorganisir tersebut, peneliti memberikan interpretasi dan kemudian menarik kesimpulan mengenai pola keteraturan ataupun penyimpangan yang ada dalam fenomena yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik dan kekuasaan

Sebagian masyarakat desa palangka masih kurang pengetahuannya tentang memilih pemimpin yang baik karena tidak berpikir untuk 5 tahun kedepannya. Dalam hal ini mereka hanya akan memilih pemimpin ketika ada uangnya yang diberikan secara langsung oleh para calon.

Ketika kita mau kaji sebenarnya eksistensi dari seorang pemimpin tersebut, maka kita sebagai masyarakat pemilih harus mengetahui siapa pemimpin yang akan kita pilih nanti karena itu sebagai orang nomor satu di daerah kita masing-masing. Namun masyarakat di desa Palangka masih minim pemahamannya terkait hal tersebut, maka dari itu terkadang memilih pemimpin tidak sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Selain itu, karena adanya berbagai tekanan-tekanan dari para penguasa yang seharusnya memberikan pemahaman dalam hal memilih pemimpin secara cerdas namun hal itu tidak dilakukan.

Sistem Kekeluargaan

Adanya suatu penekanan-penekanan terhadap masyarakat akhirnya akan terjadi pertentangan

baik itu kepada yang menekan maupun yang di antara pihak yang ditekan. Sebagaimana dalam teori konflik yang di kemukakan oleh Robert K. Merton dalam Ritzer (2009: 26) bahwa pertentangan (konflik) bisa terjadi antara anggota-anggota dalam keluarga itu sendiri, ataukah antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya.

Sesuai dengan hasil wawancara terhadap keluarga yang bersitegang dalam pemilihan kepala daerah yang lalu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa munculnya perbedaan pendapat dan rasa iri dari masyarakat sebagai pemilih disebabkan adanya politik uang yang diterapkan oleh beberapa calon, oleh karena itu masyarakat yang kurang pendidikan politiknya menanggapi dengan tidak harmonisan diantara mereka.

Terjadinya konflik antar keluarga selain disebabkan dari calon pemimpin itu sendiri juga dari masing-masing keluarga itu sendiri. Hal itu ditandai dengan adanya sistem politik uang yang dilakukan oleh tim sukses dari masing-masing calon, akhirnya masyarakat atau keluarga yang tidak dapat akan merasa iri akhirnya terjadi persekutuan diantara mereka.

Ketika kita kaitkan lagi dengan terjadinya konflik antar keluarga yang satu dengan yang lainnya, maka itu sangat jelas karena dengan beda pilihan dan memiliki kepentingan tersendiri, maka itulah yang akan menimbulkan perasaan iri diantara mereka akhirnya akan terjadi konflik.

Sesuai dengan hasil pemilukada di Desa Palangka bahwa yang menang itu tidak bisa dijamin karena adanya politik uang, karena figurnya maupun karena visi misinya serta adanya keluarga yang bertempat tinggal di Desa tersebut. Mengapa

demikian, karena ada beberapa calon yang punya keluarga tapi buktinya mereka tidak berhasil memenangkan pertarungan politik tersebut.

Sistem Status

Dalam kehidupan sosial, status dari masing-masing masyarakat akan berbeda. Ada yang statusnya dalam kehidupan bermasyarakat dipandang tinggi adapula yang rendah tergantung dari jabatan atau eksistensinya di lingkungan mereka tinggal.

Di Desa Palangka sebagian besar masyarakatnya sebagai petani dan pekebun yang notabene patuh dan setia kepada pemerintah setempat karena pemerintah setempat adalah salah satu keturunan dari pemerintah sebelumnya yang bisa dikatakan sebagai salah satu pejuang sehingga terbentuk desa Palangka, oleh karena itu masyarakat yang minim pendidikan politiknya selalu terbawa arus dengan hal-hal seperti itu.

Ketika pemerintah setempat memerintahkan bahwa ada yang harus kita kerja secara bersama-sama, maka masyarakat berbondong-bondong untuk mengerjakannya. Termasuk juga masalah pemilihan seorang pemimpin, ketika pemerintah mengatakan bahwa ada salah satu calon yang harus dipilih bersama maka masyarakat bersatu untuk memilih calon tersebut. Hal ini terjadi pada pemilukada sebelumnya.

Realitas yang terjadi sekarang pasca Pemilukada khususnya di desa Palangka perubahan sosial itu sangat jelas, salah satu bukti dari sebagian besar masyarakat patuh kepada pemerintah sebelum pemilukada namun setelah pemilukada masyarakat sudah mulai menghilangkan hal tersebut.

Hal itu menjadi salah satu bukti bahwa di Desa Palangka memang terjadi juga perubahan

status sosial masyarakat pasca pemilukada walaupun tidak menyeluruh. ketika akan memilih calon pemimpin, mereka bersatu untuk memilih calon yang diusulkan oleh pemerintah setempat dan patuh terhadap apa yang diamanatkan.

Secara umum, dari hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat Desa Palangka yang telah dilakukan menyatakan bahwa memang terjadi perubahan sosial pasca pemilukada Sinjai, terutama dari segi hubungan kekeluargaan. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa setiap pasca pemilukada memang tidak bisa dipungkiri pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terutama dalam hal hubungan kekeluargaan dalam hal ini tidak harmonisnya antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya. Dalam hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat dan timbulnya rasa iri terhadap orang lain dalam hal memilih seorang calon bupati dan calon wakil bupati.

Selain itu, yang menjadi kendala bagi sebagian besar masyarakat Desa Palangka yaitu kurangnya pengetahuan tentang pendidikan politik, jadi itulah salah satu faktor sehingga sering terjadi konflik antar keluarga yang satu dengan yang lainnya. Sistem politik dan kekuasaan juga masih diterapkan oleh sebagian besar masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan pasca pemilukada kabupaten Sinjai di Desa Palangka masih ada sistem politik dan kekuasaan yang diterapkan oleh pihak-pihak tertentu, terutama orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Dengan hal itu, maka masyarakat belum diberikan kebebasan untuk memilih calon pemimpin yang

sesuai dengan harapannya masing-masing. Selain itu, salah satu asas dalam pemilu tidak terealisasi. Di desa Palangka terjadi suatu perubahan sosial pasca pemilu 2013. adapun perubahan sosial yang terjadi yaitu sistem kekeluargaan yang tidak harmonis dan bahkan sampai pada saat ini keluarga yang dimaksud belum berkomunikasi dengan baik. Selain itu, dari sistem status masyarakat maupun pemerintah mengalami suatu perubahan yang sebelumnya masyarakat patuh terhadap pemerintah namun lambat laun hal itu mulai mengalami suatu perubahan dan terbukti pada saat pasca pemilu 2013, status Pemerintah setempat sebagai pemimpin dalam masyarakat tidak terlalu nampak lagi terhadap sebagian masyarakat Desa Palangka. Dalam hal ini masyarakat tidak terlalu mengikuti apa yang diusulkan oleh pemerintah setempat dalam hal pemilihan seorang pemimpin terutama untuk pemilihan calon legislatif yang akan datang. Selain dari hal tersebut, terjadi perubahan sosial dalam hal struktur organisasi terhadap pola hubungan sosial masyarakat yang sebelumnya hanya tokoh masyarakat biasa menjadi pengurus dalam suatu partai. Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menyarankan atau merekomendasikan bagi pihak yang terkait dalam pemilu 2013. Agar kiranya melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang pendidikan politik-nya atau bahkan secara umum kepada semua masyarakat.

Daftar Pustaka

- Congge, Umar (2012). *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Muhammadiyah Sinjai.
- Ritzer, George. 2009. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. New Jersey: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohman, Mujibur. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial*. [http: //](http://)

- [sosio-history.blogspot.com/2013/01/Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. html](http://sosio-history.blogspot.com/2013/01/Faktor-faktor-yang-mempengaruhi-perubahan-sosial.html).
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan daerah*.